

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2018 - 2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rancangan Akhir Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang serta berpedoman kepada RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Demikian Rancangan Akhir Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Akhir Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023, yang diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat

meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kepedulian dan partisipasinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG



MIE GO S.T., M.Si.
NIP. 197301072000031005

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | I |
| I.1 Latar Belakang | 1 – I |
| I.2 Landasan Hukum | 3 – I |
| I.3 Maksud Dan Tujuan | 6 – I |
| I.4 Sistematika Penulisan | 6 – I |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN | II |
| II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 1 - II |
| II.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD..... | 8 - II |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PD | III |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | IV |
| IV.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah..... | 1 - IV |
| IV.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 1 - IV |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | V |
| V.1 STRATEGI | 1 - V |
| V.2 ARAH KEBIJAKAN | 2 - V |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | VI |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | VII |
| BAB VIII PENUTUP | VIII |

DAFTAR TABEL

| | | | |
|-------|------|--|----|
| TABEL | II.1 | Jumlah pegawai dalam jabatan struktural/eselon | 45 |
| TABEL | II.2 | Jumlah pegawai pada bidang | 46 |
| TABEL | II.3 | Jumlah pegawai berdasarkan golongan | 46 |
| TABEL | II.4 | Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan | 47 |
| TABEL | II.5 | Jumlah pegawai PHT berdasarkan pendidikan | 47 |
| TABEL | IV.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD | 55 |
| TABEL | IV.2 | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan | 58 |
| TABEL | V.1 | Rencana Program dan Kegiatan, indicator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif | 62 |
| TABEL | VI.1 | Indikator Kinerja Pekerjaan Umum Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang | 65 |

BAB

1

PENDAHULUAN

BAB I

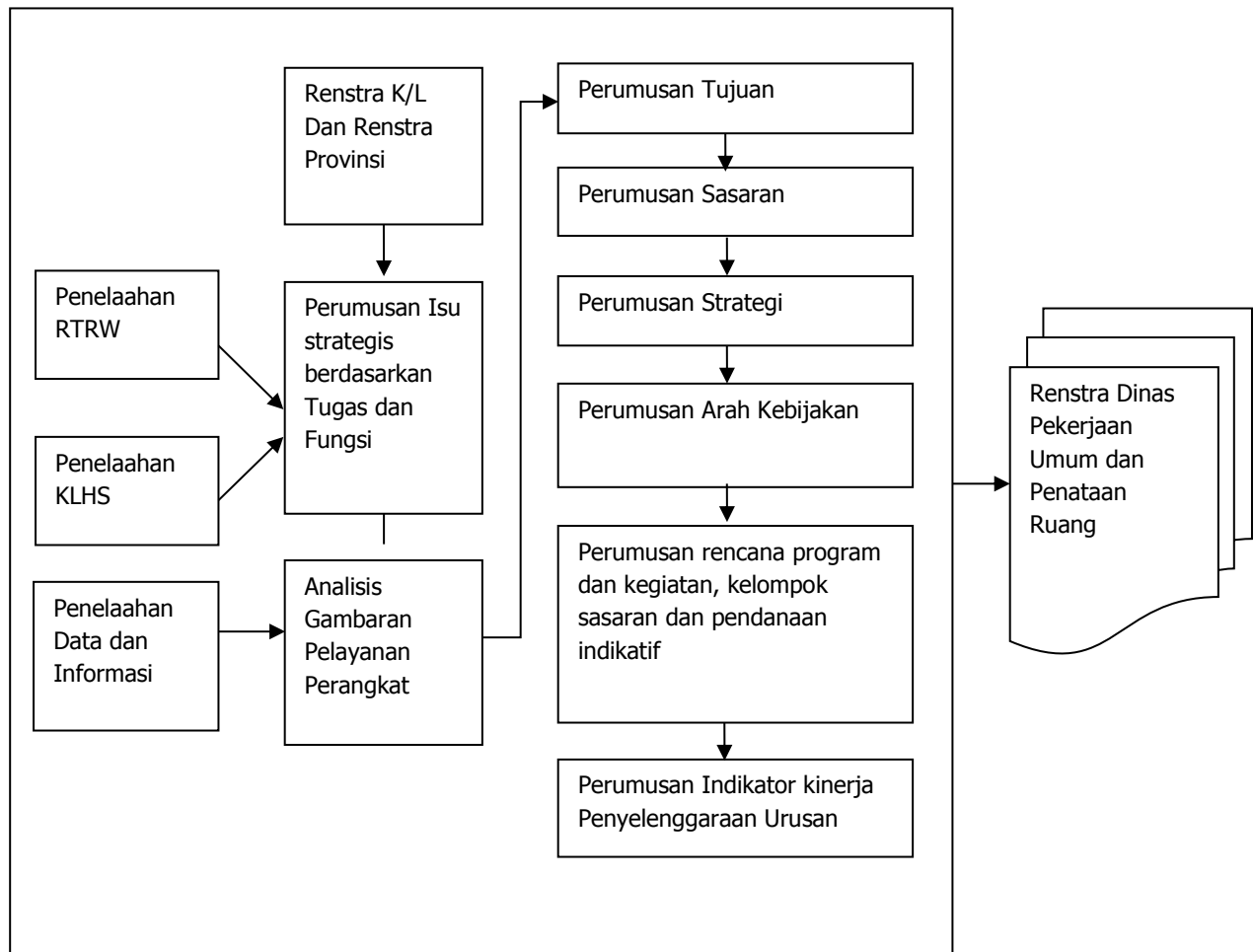
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019 telah ditetapkan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang, RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2016, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2022. Selain itu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
25. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang.
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan

dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB

2

GAMBARAN PELAYANAN

BAB II

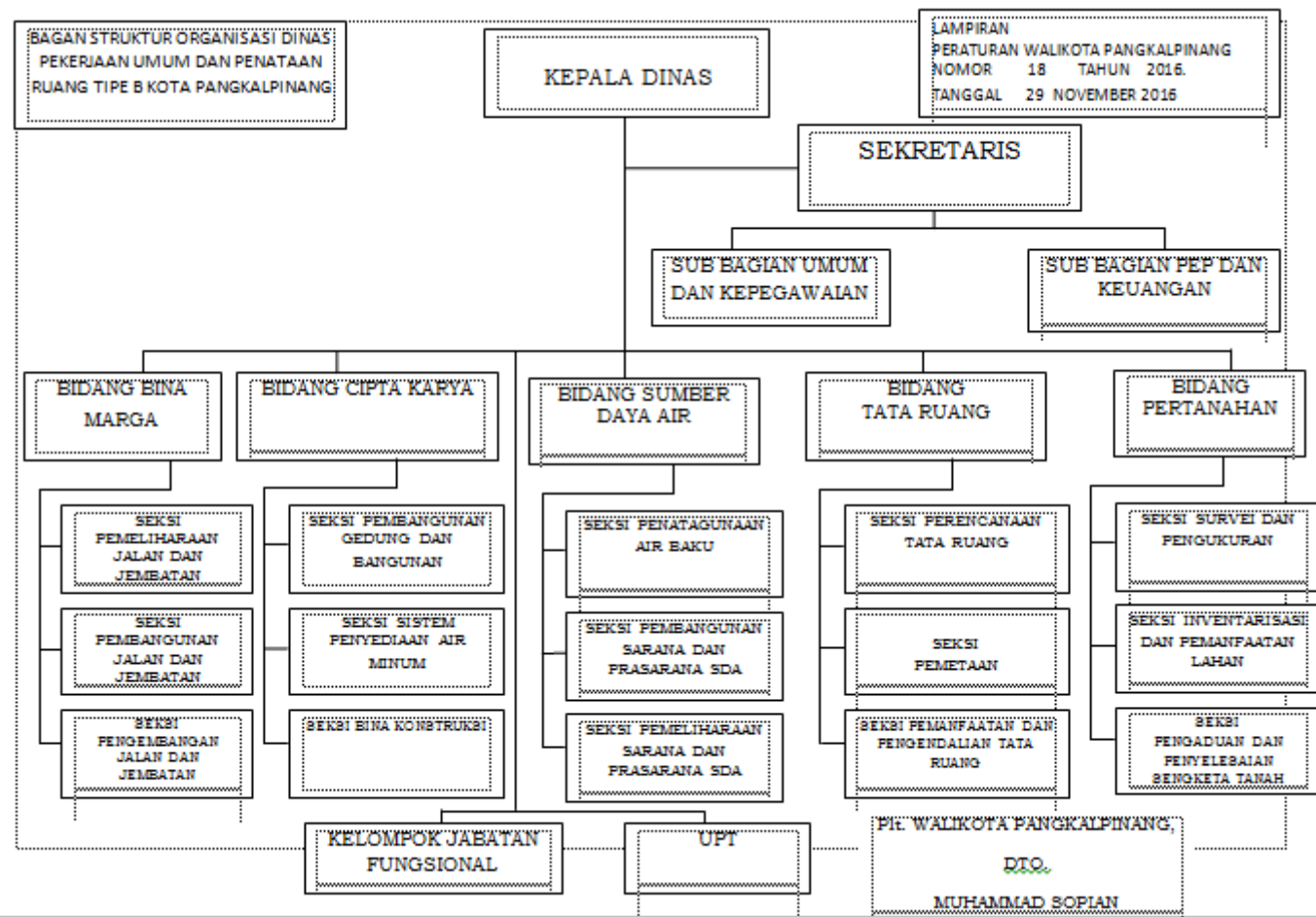
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 3. Seksi Pengembangan Jalan dan Jembatan
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Gedung dan Bangunan
 2. Seksi Sistem Penyediaan Air Minum
 3. Seksi Bina Konstruksi.
- e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 1. Seksi Penatagunaan Air Baku
 2. Seksi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air
 3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA
- f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 2. Seksi Pemetaan
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
- g. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 1. Seksi Survei dan Pengukuran

2. Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan Lahan
 3. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Tanah
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

2.4.2 Uraian Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan ;
- b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan
- d. Penetapan rencana kerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan
- f. Pelaksanaan perencanaan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh satu orang Sekretaris, sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (3) angka 1 mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 5) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bidang Bina Marga

Sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (2) angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bina Marga yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Bina Marga kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Bina Marga;
- 2) penyusunan petunjuk teknis lingkup Bina Marga;
- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Bina Marga lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- 4) pemberdayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkup

Bina Marga;

- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bina Marga;
- 6) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Bina Marga.

c. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (2) angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Cipta Karya yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Cipta Karya kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Cipta Karya ;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Cipta Karya lingkup pembangunan perumahan permukiman dan pemeliharaan perumahan permukiman
- 3) pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Cipta Karya
- 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Cipta Karya
- 5) pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Cipta Karya.

d. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (2) angka 4 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sumber Daya Air yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Sumber Daya Air kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Sumber Daya Air
- 2) penyusunan petunjuk teknis lingkup Sumber Daya Air

- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sumber Daya Air lingkup pembangunan sarana dan prasarana SDA serta pemeliharaan sarana dan prasarana SDA
- 4) pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Sumber Daya Air
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sumber Daya Air
- 6) pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Sumber Daya Air.

e. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (2) angka 5 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tata Ruang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Tata Ruang kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Tata Ruang;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Tata Ruang;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Tata Ruang lingkup Perencanaan, Survey dan Pemetaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;
- 4) Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Tata Ruang;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Tata Ruang;
- 6) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Tata Ruang.

f. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (3) angka 6 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pertanahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pertanahan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pertanahan;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Pertanahan;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pertanahan Lingkup Pendataan dan Penguasaan Tanah;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pertanahan;
- 5) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepala Dinas Pekerjaan Umum serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pertanahan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2019 sebanyak 129 orang, terdiri dari 48 PNS (36 laki-laki dan 12 perempuan) dan 81 non PNS (58 laki-laki dan 23 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan SLTA/SMA sejumlah 56 orang, dan berpendidikan S1 sejumlah 50 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

| No | Tingkat Pendidikan | PNS | | Non PNS | | Jumlah |
|----|--------------------|-----|---|---------|----|--------|
| | | L | P | L | P | |
| 1 | SD Sederajat | 1 | - | 4 | 2 | 7 |
| 2 | SMP Sederajat | - | - | 5 | 1 | 6 |
| 3 | SMA Sederajat | 6 | 2 | 38 | 12 | 58 |
| 4 | D3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |

| No | Tingkat Pendidikan | PNS | | Non PNS | | Jumlah |
|----|--------------------|-----|---|---------|---|--------|
| | | L | P | L | P | |
| 5 | S1/D4 | 25 | 7 | 9 | 6 | 47 |
| 6 | S2 | - | 1 | - | - | 1 |
| | Jumlah | | | | | 129 |

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 33 orang pada tahun 2019, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 (tahun terakhir)

| No | Golongan | L | P | Jumlah |
|----|--------------|----|---|--------|
| 1 | Golongan I | 1 | - | 1 |
| 2 | Golongan II | 7 | 2 | 9 |
| 3 | Golongan III | 25 | 8 | 33 |
| 4 | Golongan IV | 3 | 2 | 5 |

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

| NO | Aset / Sarana dan Prasarana | JUMLAH BARANG | HARGA (Rp) | Kondisi |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Makam Umum/Kuburan Umum | 1 | 350.000.000 | Baik |
| 2 | Danau Lain-lain | 18 | 17.076.745.000 | Baik |
| 3 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 1 | 160.000.000 | Baik |
| 4 | Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain | 1 | 1.466.335.700 | Baik |
| 5 | Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain | 1 | 133.770.000 | Baik |
| 6 | Tanah Bangunan Pasar | 1 | 36.216.000 | Baik |
| 7 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 8 | 4.692.491.800 | Baik |
| 8 | Pengadaan Tanah Untuk Kantor Lurah | 1 | 778.000.000 | Baik |
| 9 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | 1 | 534.650.000 | Baik |
| 10 | Tanah | 1 | 5.732.889.502 | Baik |
| 11 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | 1 | 33.390.000 | Baik |
| 12 | Tanah Bangunan Tempat Ibadah | 1 | 470.000.000 | Baik |
| 13 | Tanah Tegalan | 1 | 1.261.827.000 | Baik |
| 14 | Tanah kosong yang sudah diperuntukkan | 5 | 450.637.950 | Baik |
| 15 | Tanah Kosong Lainnya | 7 | 8.639.437.700 | Baik |
| 16 | Pengadaan Tanah | 1 | 5.400.000.000 | Baik |
| 17 | Tanah Untuk Jalan Kota | 986 | 341.725.485.581 | Baik |
| 18 | Tanah Utk Bangunan Jalan Lain-lain | 7 | 10.838.125.120 | Baik |
| 19 | Tanah Utk Bangunan Air Lain-lain | 1 | 752.961.000 | Baik |
| 20 | Tanah Untuk Bangunan Mesjid | 1 | 156.800.000 | Baik |
| 21 | Excavator Lain-lain | 1 | | Baik |

| | | | | |
|----|--|---|---------------|-------------|
| | | | 808.995.000 | |
| 22 | Excavator Lain-lain | 2 | 3.877.705.000 | Baik |
| 23 | Vibration Roller | 1 | 532.125.000 | Baik |
| 24 | Stamper | 1 | 47.500.000 | Baik |
| 25 | Stoom Wals | 1 | 171.000.000 | Baik |
| 26 | Concrete Breaker | 1 | 25.650.000 | Baik |
| 27 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 1 | 160.150.000 | Baik |
| 28 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 1 | 170.000.000 | Baik |
| 29 | mobil dinas | 1 | 224.327.673 | Baik |
| 30 | Truck + Attachhment | 2 | 171.000.000 | Rusak Berat |
| 31 | Truck + Attachhment | 1 | 200.687.500 | Rusak Berat |
| 32 | Truck + Attachhment | 1 | 297.000.000 | Baik |
| 33 | Truck + Attachhment | 1 | 349.553.000 | Baik |
| 34 | Pick Up | 1 | 66.500.000 | Rusak Berat |
| 35 | Pick Up | 1 | 119.500.000 | Baik |
| 36 | Pick Up | 1 | 119.500.000 | Baik |
| 37 | Pick Up | | 414.160.000 | Baik |
| 38 | Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain | 1 | 401.145.600 | Baik |
| 39 | Sepeda Motor | 1 | 13.795.000 | Kurang Baik |
| 40 | Sepeda Motor | 1 | 13.795.000 | Kurang Baik |
| 41 | Sepeda Motor | 1 | 14.647.200 | Baik |
| 42 | Sepeda Motor | 1 | 14.647.200 | Baik |
| 43 | Sepeda Motor | 1 | 14.647.200 | Baik |
| 44 | Sepeda Motor | 1 | 24.700.000 | Baik |
| 45 | Sepeda Motor | 1 | 24.700.000 | Baik |
| 46 | Sepeda | | 14.647.200 | Baik |
| 47 | Sepeda | | 13.205.000 | Baik |

| | | | | |
|----|---------------------------------|---|-------------|-------------|
| 48 | Global Positioning System (GPS) | 1 | 7.000.000 | Baik |
| 49 | Global Positioning System (GPS) | 3 | 14.850.000 | Baik |
| 50 | Global Positioning System (GPS) | 5 | 23.750.000 | Baik |
| 51 | Global Positioning System (GPS) | 1 | 10.000.000 | Baik |
| 52 | ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) | 1 | 96.800.000 | Baik |
| 53 | ALat Ukur Lainnya | | 440.542.300 | Baik |
| 54 | Lasemeter/Distometer | 1 | 10.000.000 | Baik |
| 55 | Mesin Rumput | 5 | 20.750.000 | Baik |
| 56 | Lemari Besi | 1 | 5.500.000 | Baik |
| 57 | Rak Besi/Metal | 5 | 14.880.000 | Baik |
| 58 | Filling Besi/Metal | 2 | 2.720.000 | Baik |
| 59 | Filling Besi/Metal | 4 | 4.800.000 | Rusak Berat |
| 60 | Filling Besi/Metal | 2 | 5.900.000 | Baik |
| 61 | Filling Besi/Metal | 2 | 4.926.668 | Rusak Berat |
| 62 | Filling Besi/Metal | 4 | 9.853.332 | Kurang Baik |
| 63 | Filling Besi/Metal | 1 | 2.450.000 | Rusak Berat |
| 64 | Lemari Kaca | 1 | 648.000 | Baik |
| 65 | Lemari Kaca | 1 | 1.800.000 | Baik |
| 66 | Alat Penghancur Kertas | 2 | 13.600.000 | Rusak Berat |
| 67 | Alat Penghancur Kertas | 4 | 27.200.000 | Kurang Baik |
| 68 | Alat Penghancur Kertas | 5 | 31.500.000 | Baik |
| 69 | Alat Penghancur Kertas | 1 | 6.300.000 | Rusak Berat |
| 70 | Peta | 1 | 80.000 | Baik |
| 71 | Alat Uji Kontruksi | 1 | 4.000.000 | Baik |
| 72 | Camera electronic | 1 | 7.968.500 | Baik |
| 73 | Handy Talki | 4 | 3.729.000 | Baik |
| 74 | Dystrometer | 1 | 5.800.000 | Baik |

| | | | | |
|-----|--------------|-----|-------------|-------------|
| 75 | Kursi Rapat | 25 | 13.125.000 | Baik |
| 76 | Kursi Putar | 5 | 1.720.000 | Baik |
| 77 | Kursi Putar | 30 | 43.200.000 | Baik |
| 78 | Meja Biro | 6 | 29.700.000 | Baik |
| 79 | Meja Biro | 30 | 59.700.000 | Baik |
| 80 | Sofa | 6 | 47.340.000 | Baik |
| 81 | Kursi Kerja | 1 | 3.000.000 | Baik |
| 82 | Kursi Kerja | 2 | 1.325.000 | Baik |
| 83 | Kursi Kerja | 5 | 2.650.000 | Baik |
| 84 | Kursi Kerja | 1 | 662.500 | Kurang Baik |
| 85 | Kursi Kerja | 3 | 1.800.000 | Baik |
| 86 | Kursi Kerja | 2 | 1.260.000 | Baik |
| 87 | Kursi Kerja | 4 | 2.960.000 | Baik |
| 88 | Kursi Kerja | 1 | 1.980.000 | Baik |
| 89 | Kursi Kerja | 10 | 10.450.000 | Baik |
| 90 | Kursi Rapat | 100 | 35.000.000 | Baik |
| 91 | Gordyn | 1 | 197.999.802 | Baik |
| 92 | Rak TV | 1 | 1.395.000 | Baik |
| 93 | kursi biro | 6 | 15.000.000 | Baik |
| 94 | kursi biro | 30 | 44.850.000 | Baik |
| 95 | Kursi Tunggu | 5 | 22.000.000 | Baik |
| 96 | water pass | 1 | 348.000 | Baik |
| 97 | water pass | 1 | 348.000 | Baik |
| 98 | Lemari Es | 1 | 2.500.000 | Baik |
| 99 | Dispenser | 1 | 2.250.000 | Baik |
| 100 | Televisi | 1 | 2.500.000 | Baik |
| 101 | Mesin Air | 1 | 9.120.000 | Baik |

| | | | | |
|-----|-----------------------|---|------------|-------------|
| 102 | Mesin Air | 1 | 11.340.000 | Baik |
| 103 | Baterai | 2 | 3.700.000 | Baik |
| 104 | P.C Unit/ Komputer PC | 2 | 24.500.000 | Kurang Baik |
| 105 | P.C Unit/ Komputer PC | 2 | 24.600.000 | Kurang Baik |
| 106 | P.C Unit/ Komputer PC | 1 | 12.800.000 | Baik |
| 107 | P.C Unit/ Komputer PC | 1 | 13.860.000 | Baik |
| 108 | P.C Unit/ Komputer PC | 2 | 27.370.000 | Baik |
| 109 | P.C Unit/ Komputer PC | 5 | 69.900.000 | Baik |
| 110 | P.C Unit/ Komputer PC | | 89.400.000 | Baik |
| 111 | Lap Top | 2 | 16.060.000 | Baik |
| 112 | Lap Top | 2 | 24.860.000 | Baik |
| 113 | Lap Top | 4 | 34.000.000 | Baik |
| 114 | Lap Top | 2 | 19.000.000 | Baik |
| 115 | Lap Top | 7 | 66.500.000 | Baik |
| 116 | Lap Top | 1 | 9.500.000 | Baik |
| 117 | Lap Top | 1 | 29.900.000 | Baik |
| 118 | GPS | 1 | 7.568.000 | Baik |
| 119 | Printer | 1 | 1.975.000 | Baik |
| 120 | Printer | 1 | 4.200.000 | Baik |
| 121 | Printer | 5 | 13.750.000 | Baik |
| 122 | Printer | | 8.750.000 | Baik |
| 123 | Printer | | 18.000.000 | Baik |
| 124 | Monitor | 4 | 7.800.000 | Baik |
| 125 | Printer | 1 | 13.875.000 | Baik |
| 126 | Printer | 5 | 31.000.000 | Baik |
| 127 | Printer | | 8.750.000 | Baik |
| 128 | Scanner A3 | | 8.500.000 | Baik |

| | | | | |
|-----|---|----|------------|-------------|
| 129 | Printer | | 5.800.000 | Baik |
| 130 | Scanner | | 4.575.000 | Baik |
| 131 | Ploter | | 95.000.000 | Baik |
| 132 | UPS / stabilizer | | 2.300.000 | Baik |
| 133 | UPS | 3 | 4.350.000 | Kurang Baik |
| 134 | UPS | 1 | 1.450.000 | Kurang Baik |
| 135 | UPS | 5 | 5.875.000 | Baik |
| 136 | UPS | | 7.250.000 | Baik |
| 137 | UPS | | 9.600.000 | Baik |
| 138 | Modem | 6 | 2.250.000 | Kurang Baik |
| 139 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 9.000.000 | Baik |
| 140 | Meja Kerja | 1 | 6.500.000 | Baik |
| 141 | Meja Kerja | 2 | 1.940.000 | Baik |
| 142 | Meja Kerja | 6 | 5.350.000 | Baik |
| 143 | Meja Kerja | 5 | 6.375.000 | Baik |
| 144 | Meja Kerja | 5 | 7.475.000 | Baik |
| 145 | Meja Kerja | 6 | 5.400.000 | Baik |
| 146 | Meja Kerja | 3 | 3.675.000 | Baik |
| 147 | Meja Kerja | 1 | 3.641.000 | Baik |
| 148 | Meja Kerja | 2 | 2.420.000 | Baik |
| 149 | Meja Kerja | 8 | 9.680.000 | Baik |
| 150 | Meja Rapat | 8 | 23.120.000 | Baik |
| 151 | Meja Kerja | 30 | 59.400.000 | Baik |
| 152 | Kursi Kerja Pejabat Lain-lain | 3 | 7.050.000 | Baik |
| 153 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II | 1 | 14.900.000 | Baik |
| 154 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 4 | 11.820.000 | Rusak Berat |
| 155 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 10 | 29.800.000 | Baik |

| | | | | |
|-----|--|----|----------------|-------------|
| 156 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 4 | 13.500.000 | Kurang Baik |
| 157 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 1 | 3.375.000 | Rusak Berat |
| 158 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 1 | 3.350.000 | Rusak Berat |
| 159 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 4 | 13.540.000 | Baik |
| 160 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 1 | 3.385.000 | Rusak Berat |
| 161 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 5 | 21.000.000 | Baik |
| 162 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 1 | 4.200.000 | Rusak Berat |
| 163 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 4 | 15.800.000 | Baik |
| 164 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 6 | 29.850.000 | Baik |
| 165 | Proyektor | | 7.500.000 | baik |
| 166 | Layar Proyektor | 1 | 25.630.000 | Baik |
| 167 | Camera Electronic | 2 | 2.750.000 | Baik |
| 168 | Camera Electronic | 1 | 6.500.000 | Baik |
| 169 | Camera Electronic | 1 | 10.000.000 | Baik |
| 170 | Handy Cam | 1 | 58.000.000 | Baik |
| 171 | Theodolit | 1 | 11.200.000 | Baik |
| 172 | Theodolit | 1 | 15.200.000 | Baik |
| 173 | Facsimile | 1 | 4.200.000 | Baik |
| 174 | kamera | 1 | 5.200.000 | Baik |
| 175 | AM Monitor | 1 | 1.975.000 | Baik |
| 176 | AM Monitor | 2 | 3.950.000 | Kurang Baik |
| 177 | Pengeras suara(TOA) | 1 | 9.900.000 | Baik |
| 178 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 15 | 15.787.888.094 | Baik |
| 179 | rumah dinas | 1 | 199.960.000 | Baik |
| 180 | Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain | 1 | 192.399.480 | Kurang Baik |
| 181 | Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain | 1 | 17.928.250 | Baik |
| 182 | Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium | 1 | 49.900.000 | Baik |

| | | | | |
|-----|---|---|---------------|-------------|
| 183 | Bangunan Kesehatan Lain-lain | 1 | 189.850.000 | Baik |
| 184 | Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen | 1 | 389.515.600 | Baik |
| 185 | Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen | 1 | 164.850.000 | Baik |
| 186 | Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen | 1 | 5.861.164.400 | Baik |
| 187 | Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen | 1 | 99.425.000 | Baik |
| 188 | Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen | 1 | 4.837.500 | Kurang Baik |
| 189 | Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen | 1 | 579.675.600 | Baik |
| 190 | Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 1.923.836.440 | Kurang Baik |
| 191 | Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 199.750.000 | Baik |
| 192 | Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 1.966.400.000 | Baik |
| 193 | Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 199.900.000 | Baik |
| 194 | Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Semi Permanen | 1 | 87.900.000 | Baik |
| 195 | Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain | 1 | 2.768.447.560 | Kurang Baik |
| 196 | Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain | 9 | 4.007.794.380 | Baik |
| 197 | Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen | 1 | 372.908.400 | Kurang Baik |
| 198 | Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen | 1 | 248.605.600 | Baik |
| 199 | Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen | 1 | 1.821.300.000 | Baik |
| 200 | Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen | 1 | 14.949.100 | Kurang Baik |
| 201 | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain | 8 | 1.512.435.250 | Baik |
| 202 | Gedung Pos Jaga Permanen | 1 | 1.110.000 | Kurang Baik |
| 203 | Gedung Pos Jaga Permanen | 1 | 4.955.000 | Kurang Baik |
| 204 | Gedung Pos Jaga Permanen | 1 | 59.960.000 | Baik |
| 205 | Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain | 1 | 49.333.200 | Baik |
| 206 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen | 1 | 149.920.000 | Baik |
| 207 | Bangunan Gedung Kantor Lurah | 1 | 555.412.000 | Baik |
| 208 | Bangunan Gedung Kantor Lurah | 1 | 568.523.000 | Baik |
| 209 | Bangunan Gedung Kantor Lurah | 1 | 563.958.000 | Baik |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|---------------|-------------|
| 210 | Pel.Pemagaran Tanah Pemkot | 1 | 320.322.000 | Baik |
| 211 | Pel. Pemagaran Tanah Pemkot | 1 | 720.518.000 | Baik |
| 212 | Pel. Pemagaran Tanah Pemkot | 1 | 654.929.000 | Baik |
| 213 | Konstruksi Pagar | 9 | 1.357.321.706 | Baik |
| 214 | Bangunan Conblock | 1 | 2.482.500 | Kurang Baik |
| 215 | Bangunan Conblock | 1 | 13.950.025 | Kurang Baik |
| 216 | Bangunan Conblock | 1 | 99.625.000 | Baik |
| 217 | Kamar Kecil/Toilet | 23 | 1.907.053.250 | Kurang Baik |
| 218 | Kanopi | 1 | 99.850.000 | Baik |
| 219 | Sumur Bor | 1 | 167.367.000 | Kurang Baik |
| 220 | Sumur Bor | 1 | 181.717.000 | Kurang Baik |
| 221 | Sumur Bor | 1 | 345.560.000 | Kurang Baik |
| 222 | Sumur Bor | 1 | 74.250.000 | Baik |
| 223 | Sumur Bor | 1 | 83.853.000 | Baik |
| 224 | Sumur Bor | 1 | 173.268.000 | Baik |
| 225 | Sumur Bor | 1 | 199.885.000 | Baik |
| 226 | Bangunan Parkir | 1 | 99.250.000 | Baik |
| 227 | Bangunan Parkir | 1 | 99.625.000 | Baik |
| 228 | Bangunan Parkir | 1 | 79.725.000 | Baik |
| 229 | Pintu Rolling Door | 1 | 571.285.300 | Kurang Baik |
| 230 | Talut Penahan Tanah | 1 | 483.757.000 | Baik |
| 231 | Asrama Permanen | 1 | 99.000.000 | Baik |
| 232 | Flat/rumah Lain-lain | 1 | 49.960.000 | Baik |
| 233 | Rumah Dinas Tanpa Golongan Permanen | 1 | 120.176.576 | Baik |
| 234 | Papan Reklame | 1 | 108.643.000 | Baik |
| 235 | Papan Reklame | 1 | 108.643.000 | Baik |
| 236 | Papan Reklame | 1 | 9.400.000 | Baik |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 237 | Papan Reklame | 1 | 187.515.000 | Baik |
| 238 | reklame | 1 | 1.751.756.100 | Baik |
| 239 | reklame | 1 | 1.140.003.746 | Baik |
| 240 | reklame | 1 | 37.500.000 | Baik |
| 241 | reklame | 1 | 106.500.000 | Baik |
| 242 | reklame | 1 | 45.609.000 | Baik |
| 243 | Spanduk | 1 | 9.995.000 | Baik |
| 244 | Spanduk | 1 | 9.500.000 | Baik |
| 245 | Bando Jalan | 1 | 79.767.000 | Baik |
| 246 | Bando Jalan | 1 | 61.898.000 | Baik |
| 247 | Bando Jalan | 1 | 52.567.000 | Baik |
| 248 | Bilboard | 1 | 24.312.000 | Baik |
| 249 | Bilboard | 1 | 9.400.000 | Baik |
| 250 | Bilboard | 1 | 9.400.000 | Baik |
| 251 | Bilboard | 1 | 9.400.000 | Baik |
| 252 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1.119 | 671.525.534.046 | Kurang Baik |
| 253 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | 156.700.000 | Baik |
| 254 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | 199.600.000 | Baik |
| 255 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | 199.620.000 | Baik |
| 256 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | 199.620.000 | Baik |
| 257 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | 161.750.000 | Baik |
| 258 | Jalan Bukit merapin kampak | | 1.750.445.976 | Baik |
| 259 | Jalan Poros RSH Pundi Emas | | 1.623.148.829 | Baik |
| 260 | Peningkatan Jl. Pasir Putih | | 1.290.777.733 | Baik |
| 261 | Peningkatan Jl. Air Kepala T ujuh | | 1.678.690.248 | Baik |
| 262 | Jalan Trotoar | 56 | 6.273.578.775 | Baik |
| 263 | Jalan Lingkungan/Halaman | 24 | 8.258.526.250 | Kurang Baik |

| | | | | |
|-----|---|----|----------------|-------------|
| 264 | Jalan Lingkungan/Halaman | 1 | 149.151.000 | Baik |
| 265 | Jalan Lingkungan/Halaman | 1 | 402.922.000 | Baik |
| 266 | Jalan Lingkungan/Halaman | 1 | 385.371.648 | Baik |
| 267 | Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Kolektor | 35 | 3.971.375.000 | Kurang Baik |
| 268 | Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Kolektor | 94 | 16.474.587.534 | Baik |
| 269 | Jembatan Penyeberangan Kendaraan | 1 | 248.639.000 | Kurang Baik |
| 270 | Jembatan Penyeberangan Kendaraan | 1 | 2.766.392.000 | Kurang Baik |
| 271 | Jembatan Penyebrangan Lain-lain | 1 | 2.475.000 | Kurang Baik |
| 272 | Jembatan Penyebrangan Lain-lain | 1 | 4.950.000 | Kurang Baik |
| 273 | Jembatan Penyebrangan Lain-lain | 1 | 2.472.500 | Kurang Baik |
| 274 | Jembatan Penyebrangan Lain-lain | 1 | | Kurang Baik |
| 275 | Saluran Induk | 1 | 199.370.000 | Baik |
| 276 | Saluran Induk | 1 | 148.776.913 | Baik |
| 277 | Saluran Induk | 1 | 148.726.174 | Baik |
| 278 | Saluran Induk | 1 | 99.345.000 | Baik |
| 279 | Saluran Induk | 1 | 148.776.913 | Baik |
| 280 | Saluran Induk | 1 | 99.345.000 | Baik |
| 281 | Saluran Induk | 1 | 77.000.000 | Baik |
| 282 | Saluran Tertier | 1 | 106.550.000 | Baik |
| 283 | Pembangunan Box Colvert Jl.A.Yani | | 4.949.545.000 | Baik |
| 284 | Saluran kolong Bintang | | 1.950.000.000 | Baik |
| 285 | Saluran Jalan Jebung Dalam Gang Asri | | 117.100.000 | Baik |
| 286 | Instalasi Listrik | 1 | 15.950.000 | Kurang Baik |
| 287 | Instalasi Listrik | 1 | 522.828.000 | Baik |
| 288 | Instalasi Listrik | 1 | 843.065.000 | Baik |
| 289 | Instalasi Listrik | 1 | 29.606.000 | Baik |
| 290 | Penambahan daya listrik | 1 | 29.327.500 | Baik |

| | | | | |
|-----|--|-----|----------------|-------------|
| 291 | Penambahan daya listrik | 1 | 23.290.336 | Baik |
| 292 | Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain | 1 | 1.545.281.000 | Baik |
| 293 | Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain | 1 | 320.709.000 | Kurang Baik |
| 294 | Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain | 1 | 39.700.000 | Kurang Baik |
| 295 | Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain | 1 | 34.980.000 | Baik |
| 296 | Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain | 1 | 87.450.000 | Baik |
| 297 | Pipa Distribusi Primer | 9 | 83.935.700 | Kurang Baik |
| 298 | Pipa Distribusi Primer | 1 | 943.105.000 | Baik |
| 299 | Pipa Distribusi Primer | 1 | 530.823.000 | Baik |
| 300 | Pipa Distribusi Primer | 1 | 550.545.000 | Baik |
| 301 | Pipa Distribusi Primer | 1 | 1.683.895.000 | Baik |
| 302 | Pipa Distribusi Retikuler | 1 | 1.695.000 | Kurang Baik |
| 303 | Pipa Distribusi Retikuler | 1 | 2.487.500 | Kurang Baik |
| 304 | Pipa Distribusi Retikuler | 1 | 180.750.000 | Baik |
| 305 | Pipa Distribusi Retikuler | 1 | 199.700.000 | Baik |
| 306 | Pipa Distribusi Retikuler | 1 | 319.175.000 | Baik |
| 307 | Pipa Distribusi Retikuler | 1 | 135.940.000 | Baik |
| 308 | Pipa Distribusi Sekunder | 1 | 293.627.000 | Baik |
| 309 | Pipa Distribusi Sekunder | 1 | 1.242.500.000 | Baik |
| 310 | Pipa Distribusi Sekunder | 1 | 525.548.000 | Baik |
| 311 | Sumur Bor | 62 | 3.571.062.500 | Kurang Baik |
| 312 | MCK | 10 | 3.528.213.661 | Baik |
| 313 | Pembangunan Talud | 73 | 16.487.328.186 | Kurang Baik |
| 314 | Pembangunan Talud | 41 | 9.486.825.111 | Baik |
| 315 | Normalisasi Saluran | 139 | 10.982.215.249 | Kurang Baik |
| 316 | Normalisasi Saluran | 76 | 8.647.691.000 | Baik |
| 317 | Normalisasi Kolam Retensi | 36 | 3.322.829.000 | Kurang Baik |

| | | | | |
|-----|-------------------|-----|----------------|-------------|
| 318 | Saluran Jalan | 241 | 18.204.930.130 | Kurang Baik |
| 319 | Saluran Jalan | 557 | 51.527.059.757 | Baik |
| 320 | Drainase Primer | 346 | 39.539.425.300 | Kurang Baik |
| 321 | Drainase Primer | 92 | 14.857.509.450 | Baik |
| 322 | Drainase Sekunder | 19 | 1.211.700.200 | Kurang Baik |
| 323 | Drainase Sekunder | 34 | 3.148.660.000 | Baik |
| 324 | Drainase Tersier | 16 | 2.098.617.000 | Baik |

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama kurun waktu tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas PUPR Kota Pangkalpinang

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun ke- | | | | |
|----|--|--|--------------------------|---|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | persentaase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang | persentaase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang | | 67% | 70% | 72% | 75% | 100% | 65% | 65% | 72% | 52% | 81% | 97% | 94% | 100% | 69% | 81% |
| 2 | Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan | persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai | | 84% | 86% | 87% | 89% | 90% | 48% | 58% | 60% | 60% | 0% | 57% | 68% | 69% | 68% | 0% |
| 3 | Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan | persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | | 75% | 79% | 84% | 88% | 93% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 104% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yang sudah ditetapkan.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

| Program | Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran | Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran |
|--|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|------|------|------|------|--------------------------------|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 797.888.800 | 1.254.379.300 | 1.130.191.650 | 1.171.663.650 | 928.148.000 | 598.611.745 | 685.746.604 | 716.374.742 | 987.802.689 | 775.342.594 | 75% | 55% | 63% | 84% | 84% | -1% | -13% |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 2.743.045.000 | 4.191.222.500 | 18.263.018.250 | 436.200.950 | 7.639.850.000 | 2.401.093.750 | 3.649.182.750 | 17.369.618.400 | 277.263.383 | 2.929.118.612 | 88% | 87% | 95% | 64% | 38% | 375% | 237% |
| PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 38.850.000 | 44.400.000 | - | - | - | 26.150.000 | 44.040.000 | - | - | - | 67% | 99% | 0% | 0% | 0% | -17% | -6% |
| PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 14.301.900 | 13.205.100 | 12.358.900 | 12.358.900 | 13.600.000 | 5.489.500 | - | - | 6.825.000 | 6.761.350 | 38% | 0% | 0% | 55% | 50% | -13% | -40% |
| PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN | 31.577.980.350 | 26.259.659.300 | 17.171.701.550 | 2.873.110.000 | 6.840.000.000 | 31.436.134.000 | 25.551.346.000 | 14.177.133.500 | - | 1.025.320.500 | 10% | 97% | 83% | 0% | 15% | 73% | -53% |
| PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG | 9.817.004.000 | 13.980.887.600 | 3.643.970.000 | 3.926.450.000 | 9.240.000.000 | 9.751.820.000 | 13.727.555.000 | 3.396.643.000 | 1.613.700.000 | 4.134.392.470 | 99% | 98% | 93% | 41% | 45% | 23% | -6% |
| PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG | 2.226.018.500 | 213.664.300 | - | - | 1.000.000.000 | 2.108.040.000 | 201.160.000 | - | - | 58.797.000 | 95% | 94% | 0% | 0% | 6% | -16% | -58% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| PROGRAM REHABILITASI/PE MELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | 40.480.418.200 | 63.052.409.862 | 136.236.281.734 | 28.321.099.000 | 114.524.620.000 | 40.134.835.900 | 61.618.501.812 | 133.436.920.300 | 23.727.786.155 | 112.173.748.877 | 99% | 98% | 98% | 84% | 98% | 66% | 72% |
| PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA, JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA | 8.332.836.700 | 5.740.192.300 | 14.966.563.000 | 3.399.400.000 | 82.377.455.000 | 8.276.162.617 | 5.357.090.404 | 12.917.528.451 | 3.033.196.662 | 22.606.256.078 | 99% | 93% | 86% | 89% | 27% | 457% | 115% |
| PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM | 2.692.547.450 | 841.884.000 | 317.547.000 | 317.547.000 | - | 2.424.805.500 | 659.577.550 | 112.621.100 | 207.264.000 | - | 90% | 78% | 35% | 65% | 0% | -46% | -34% |
| PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG | - | - | - | 420.000.000 | 2.977.300.000 | - | - | - | 186.070.946 | 1.696.610.295 | 0% | 0% | 0% | 44% | 57% | 102% | 142% |
| PROGRAM PEMANFAATAN TATA RUANG | - | - | - | 84.520.000 | - | - | - | - | 67.581.304 | 805.665.085 | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | -20% | 198% |
| PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFATAN RUANG | - | - | - | 180.261.500 | 1.101.480.000 | - | - | - | 136.005.795 | 805.665.085 | 0% | 0% | 0% | 75% | 73% | 82% | 78% |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 8.410.507.000 | 37.920.507.000 | 36.427.765.950 | 173.526.750.780 | - | 7.886.138.000 | 12.900.065.250 | 34.456.014.219 | 168.212.921.178 | - | 94% | 34% | 95% | 97% | 0% | 125% | 104% |
| PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN | 7.367.848.176 | 10.412.640.300 | 93.944.627.425 | - | 6.375.036.100 | 6.476.712.000 | 9.604.922.000 | 87.926.841.900 | - | 3.939.446.000 | 88% | 92% | 94% | 0% | 62% | 149% | 133% |
| PROGRAM PEMBANGUNAN FASILITAS SALURAN JALAN | - | - | - | - | 6.670.716.400 | - | - | - | - | 6.613.950.450 | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | -20% | -20% |
| PROGRAM UTILITAS/BANGUNAN PELENGKAP SALURAN JALAN | - | - | - | - | 50.000.000 | - | - | - | - | 49.800.000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | -20% | -20% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|---|---------------|----------------|------------|------------|---|---------------|---------------|-----|-----|----|-----|-----|------|------|
| PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN | 350.196.000 | 70.483.000 | - | - | - | 86.875.000 | 41.525.000 | - | - | - | 25% | 59% | 0% | 0% | 0% | -36% | -30% |
| PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DAN FASILITAS UMUM LAINNYA | - | - | - | - | 250.000.000 | - | - | - | - | 149.643.000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | -20% | -20% |
| PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SDA DAN PENUNJANG INFRASTRUKTUR | - | - | - | 5.047.770.950 | 2.000.000.000 | - | - | - | 4.278.850.600 | 1.332.654.064 | 0% | 0% | 0% | 85% | 67% | -32% | -34% |
| PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH | - | - | - | 526.915.000 | 600.000.000 | - | - | - | 163.170.137 | 382.301.203 | 0% | 0% | 0% | 31% | 64% | -17% | 7% |
| PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | - | - | - | 1.300.000.000 | 14.086.542.000 | - | - | - | 796.540.300 | 9.089.166.962 | 0% | 0% | 0% | 61% | 65% | 177% | 188% |
| PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN | - | - | - | - | 30.000.000 | - | - | - | - | 22.092.000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | -20% | -20% |

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Masih banyaknya masyarakat yang kurang patuh terhadap kebijakan pemerintah khususnya di bidang penataan ruang, sehingga penataan pembangunan yang dilakukan sering tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.
2. Tingkat koordinasi antar lembaga belum berjalan dengan baik.
3. Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang sudah dilakukan.
4. Banyak sekali permintaan diluar rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pangkalpinang yang harus dilayani.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Kondisi sosial-politik masyarakat Kota Pangkalpinang yang kondusif
2. Adanya beberapa kegiatan strategis di Kota Pangkalpinang yang akan turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah
3. Adanya "Musrenbang" dengan segala tahapannya untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun
4. Adanya akses ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan

BAB

3

**PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- 1) Belum optimalnya Pemanfaatan teknologi informasi
- 2) Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana kantor
- 3) Masih minimnya pengembangan kompetensi aparatur

b. Permasalahan terkait Bidang Bina Marga

- 1) Kurangnya tenaga teknis untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan
- 2) Penanggulangan kerusakan yang belum maksimal
- 3) Belum adanya fasilitas laboratorium sendiri

c. Permasalahan terkait Bidang Cipta Karya

- 1) Terbatasnya tenaga teknis lapangan
- 2) Belum adanya fasilitas laboratorium sendiri

d. Permasalahan terkait Bidang Sumber Daya Air

- 1) Wilayah yang merupakan kawasan langganan banjir
- 2) Belum adanya *database* untuk saluran drainase yang ada
- 3) Keterbatasan dana anggaran dalam hal penanganan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi saluran drainase yang ada

e. Permasalahan terkait Bidang Tata Ruang

- 1) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi menyangkut penataan ruang
- 2) Jumlah SDM yang terbatas

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

**"Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota Senyum (Sejahtera Nyaman
Unggul Makmur)"**

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini akan menjadi paying dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government (e-planning, e-budgeting, e-sakip e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)*

4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengarah pada pencapaian unsur visi: ***Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota Senyum (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)*** Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-5 yaitu: Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan Peningkatan kualitas infratsrukutur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal dan sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| No | Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|----|---|---|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Misi Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup | Masih belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah | Belum terbentuknya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang | Adanya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 2 | Tujuan Peningkatan kualitas infrastruktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal | Pengelolaan infrastruktur yang berkaitan dengan lingkungan hidup belum optimal | Pembagian urusan yang menyangkut infrastruktur lingkungan hidup belum sesuai | Pemerintah daerah sudah mengeluarkan kebijakan sesuai PP 46 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 3 | Sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan | Masih terdapat ruas jalan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak, dimana jalan kota dalam kondisi rusak saat ini sebesar 18,03% dan jalan dalam kondisi rusak berat sebesar 2,81%; | Pesatnya pertumbuhan kota dan besarnya kebutuhan akses jalan kota | Adanya kebijakan menyangkut peningkatan kualitas infrastuktur yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 |

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah: "TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM Mendukung INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
6. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut::

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing

bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
2. Meningkatnya ketahanan air.
3. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
5. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
6. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
7. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung pencapaian sasaran ke-4 (empat) yaitu Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman yang ditetapkan dalam salah satu tujuan RPJMD kota pangkalpinang yaitu Peningkatan kualitas infrastruktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|----|---|--|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran. | Sistem penganggaran, perencanaan dan pemrograman yang belum terintegrasi | Belum adanya sistem yang memadai | Sudah adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) |
| 2 | Meningkatnya ketahanan air. | Belum optimalnya sistem pengolahan air baku | Kondisi sumber air baku yang kurang terpelihara | Adanya rencana peningkatan air bersih sebagaimana dimaksud dalam RTRW pasal 26 ayat (1) huruf a sebesar 54.610 m ³ pada tahun 2030 |
| 3 | Meningkatnya kemantapan jalan nasional. | Masih terdapat jalan yang rusak dan rusak berat | Pesatnya perkembangan pembangunan | Adanya kebijakan menyangkut peningkatan kualitas infrastuktur yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 |
| 4 | Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional. | Dukungan anggaran yang kurang memadai | Dana bantuan yang ada belum mencukupi | |
| 5 | Meningkatnya pengendalian dan pengawasan. | Belum optimalnya sistem pengendalian dan pengawasan tingkat perangkat daerah | Evaluasi berkala atas Efektifitas pengendalian/pemantauan yang belum optimal | Dilaksanakannya Evaluasi terkait pengendalian dan pengawasan |

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi
2. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air

3. Meningkatnya infrastruktur sesuai penataan ruang dan pertanahan
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
5. Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur
6. Penyediaan infrastruktur jalan

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-empat yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan RPJMD Kota Pangkalpinang yaitu peningkatan kualitas infratsrukutur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|----|--|---|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi | Tidak adanya wilayah khusus pertanian | tidak adanya wilayah khusus pertanian dalam RTRW | Sedang dirancangnya Perda RTRW yang baru |
| 2 | Meningkatnya infrastruktur sumber daya air | Belum adanya data laporan yang berkesinambungan dari hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan drainase yang berguna untuk penanganan selanjutnya | belum adanya database infrastruktur SDA | Adanya kebijakan walikota dalam melakukan peningkatan infrastruktur yang berlandaskan lingkungan hidup |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 3 | Meningkatnya infrastruktur sesuai penataan ruang dan pertanahan | Belum optimalnya penerapan fungsi tata ruang | Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang belum sesuai dengan fungsi penataan ruang | Adanya Rencana Infrastruktur Perkotaan dalam RTRW |
| | | Masih terjadinya konflik - konflik pertanahan | Masih banyaknya lahan bermasalah | Ditetapkannya Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan |
| 4 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur | Belum optimalnya sistem pengelolaan infrastruktur yang ada | Sistem perencanaan yang ada belum optimal | Adanya Program Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPJIM) |
| 5 | Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur | Masih kuranya fasilitas alat berat yang ada | Jumlah alat berat yang tersedia masih belum mencukupi | Sedang di upayakannya penambahan unit alat berat |
| 6 | Penyediaan infrastruktur jalan | Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan | Cukup tingginya kebutuhan akan infrastruktur jalan | Adanya Dana Bantuan infrastruktur terkait bidang Bina Marga |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang, tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata skala regional, serta kota industri skala internasional dengan konsep *water front city* yang berwawasan lingkungan. Rencana Struktur Runggang Wilayah Kota terdiri atas :

1. Sistem pusat pelayanan;
2. Sistem jaringan prasarana utama; dan
3. sistem jaringan prasarana lainnya.

Sesuai dengan Rencana Pola Tata Ruang Wilayah Kota, pembagian kawasan dibagi berdasarkan 2 jenis kawasan yaitu, Kawasan lindung dan Kawasan peruntukan Budidaya. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri atas : Ruang terbuka hijau (RTH), Ruang Cagar Budaya dan Kawasan rawan banjir. Kawasan Peruntukan Budidaya terdiri atas: dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan dengan luas 118,41 km², meliputi sebagai berikut:

1. Kawasan Perumahan dan Permukiman
2. Kawasan Perdagangan dan Jasa
3. Kawasan Perkantoran Pemerintah
4. Kawasan Peruntukan Industri
5. Kawasan Pergudangan
6. Kawasan Pelabuhan
7. Kawasan Pariwisata
8. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau
9. Kawasan Peruntukan Sektor Informal
10. Kawasan Pendidikan
11. Kawasan Kesehatan
12. Kawasan Pertahanan dan Keamanan
13. Kawasan Reklamasi Pasir Padi Water Front City

Mendasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

| No | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|----|--|--|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Kawasan Perumahan dan Permukiman | Sinergi lintas sektor yang belum optimal dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur yang berlandaskan Rencana Tata Ruang Wilayah | Pelaksanaan urusan antar sektor pelaksana yang belum sesuai dengan RTRW | Pelaksanaan Evaluasi RTRW setiap lima tahun dan sedang dilakukannya revisi Rancangan Peraturan Daerah RTRW yang baru. |
| 2 | Kawasan Perdagangan dan Jasa | | | |
| 3 | Kawasan Perkantoran Pemerintah | | | |
| 4 | Kawasan Peruntukan Industri | | | |
| 5 | Kawasan Pergudangan | | | |
| 6 | Kawasan Pelabuhan | | | |
| 7 | Kawasan Pariwisata | | | |
| 8 | Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau | | | |
| 9 | Kawasan Peruntukan Sektor Informal | | | |
| 10 | Kawasan Pendidikan | | | |
| 11 | Kawasan Kesehatan | | | |
| 12 | Kawasan Pertahanan dan Keamanan | | | |
| 13 | Kawasan Reklamasi Pasir Padi Water Front City | | | |

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terkait dengan perencanaan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Masih terdapat ruas jalan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak, dimana jalan kota dalam kondisi rusak saat ini sebesar 18,03% dan jalan dalam kondisi rusak berat sebesar 2,81%;
2. Belum optimalnya penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
3. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat
4. Masih terdapat jembatan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak, dimana jembatan Kota dalam kondisi rusak saat ini sebesar 28,57 %;
5. Belum optimalnya pengelolaan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
6. Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi
7. Belum optimalnya penanggulangan masalah banjir di kota pangkalpinang
8. Masih belum optimalnya penanganan masalah abrasi
9. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
10. Masih belum optimalnya penataan lingkungan dan bangunan
11. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang
12. Masih banyak lahan milik Pemkot Pangkalpinang yang belum bersertifikat, pada awal pendataan tahun 2016 jumlahnya mencapai lebih dari 300 bidang lahan, yang sudah disertifikasi tahun 2017 sebanyak 94 aset.

BAB

4

**TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh dari pencapaian outcome program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

1. Meningkatnya Kapasitas Air Minum
2. Meningkatnya saluran drainase dan gorong – gorong dalam kondisi baik
3. Meningkatnya sistem pengolahan air limbah domestik
4. Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Formula/ Rumus | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun | | |
|----|--|---|---|----------------|-------------|--------------|--|------|------|
| | | | | | | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal | | 1. Persentase pemenuhan infrastruktur bidang ke-PUan | | % | | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>1. Meningkatkan Kapasitas Air Minum yang Ter-distribusi</i> | <i>Kapasitas Air Baku</i> | | Liter/Detik | | 160 | 240 | 320 |
| | | <i>2. Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase dan Gorong-gorong</i> | <i>Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik</i> | | % | | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|--|-----|-----|-----|
| | | <i>3. Meningkatnya sistem pengolahan air limbah domestik</i> | <i>Sistem Pengelolaan air limbah domestik</i> | | unit | | 3 | 6 | 12 |
| | | <i>4. Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW</i> | <i>Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW</i> | <i>(Jumlah dokumen permohonan advis planning yang disetujui / jumlah dokumen advis planning yang diajukan) *100 %</i> | % | | 100 | 100 | 100 |

BAB

5

**STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN**

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Terdapat 5 strategi yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan melalui
 - a. Pembangunan jalan, saluran jalan dan jembatan baru;
 - b. Peningkatan konstruksi jalan, saluran jalan dan jembatan;
 - c. Pemeliharaan konstruksi jalan, saluran jalan dan jembatan
2. Meningkatkan pembangunan fasilitas publik serta peningkatan pengolahan air limbah dan kebutuhan air melalui
 - a. pembangunan IPAL;
 - b. pemasangan dan pengembangan konektifitas saluran air minum;
 - c. pembangunan bangunan fasilitas publik;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air
3. Meningkatkan kapasitas jasa konstruksi melalui
 - a. Pelatihan penyelenggaraan terampil jasa konstruksi;
 - b. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
 - c. Pengawasan
4. Meningkatkan kualitas penanganan banjir dan abrasi melalui :
 - a. Pembangunan talud penahan tanah;
 - b. Normalisasi saluran drainase;
 - c. Pemeliharaan dan pengembangan
5. Meningkatkan sistem penyelenggaraan penataan ruang melalui :
 - a. Perencanaan penataan ruang;
 - b. Pemanfaatan penataan ruang;
 - c. Pengendalian penataan ruang
6. Meningkatkan sistem pengeolaan dan pendataan tanah melalui :
 - a. Pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

- b. Penyelesaian konflik konflik pertanahan;
- c. Pendataan sistem pendaftaran tanah

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan dengan prioritas pada peningkatan aksesibilitas jalan dan jembatan
2. Peningkatan pembangunan fasilitas publik dan pengelolaan air minum dan air limbah dengan prioritas pada peningkatan cakupan masyarakat terhadap air minum dan air
3. Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dengan prioritas pada pengawasan, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi
4. Peningkatan penanggulangan banjir, genangan dan abrasi dengan prioritas pada kawasan rawan genangan, banjir dan abrasi.
5. Peningkatan sistem penyelenggaraan penataan ruang dengan prioritas optimalisasi penataan ruang daerah
6. Peningkatan sistem pengelolaan dan pendataan tanah dengan prioritas pada pengamanan aset pertanahan

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| Visi RPJMD: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM" (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur) | | | |
|--|--|--|---|
| Misi RPJMD yang terkait: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i> | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan daerah | Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan wilayah dan pelayanan transportasi | Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan melalui 1) pembangunan jalan, saluran jalan dan jembatan baru; 2) peningkatan konstruksi jalan, saluran jalan dan jembatan; 3) pemeliharaan konstruksi jalan, saluran jalan dan jembatan | Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan dengan prioritas pada peningkatan aksesibilitas jalan dan jembatan |
| | Meningkatnya pelayanan pembangunan fasilitas publik, pengolahan air limbah, pengelolaan Sumber daya air serta pemenuhan kebutuhan air minum bagi | Meningkatkan pembangunan fasilitas publik serta peningkatan pengolahan air limbah dan kebutuhan air melalui 1) pembangunan IPAL; 2) pemasangan dan | Peningkatan pembangunan fasilitas publik dan pengelolaan air minum dan air limbah dengan prioritas pada peningkatan cakupan masyarakat terhadap air |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | masyarakat | pengembangan konektifitas saluran air minum; 3) pembangunan bangunan fasilitas publik; 4) pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air | minum dan air limbah serta pembangunan fasilitas publik yang mendukung perkembangan daerah |
| | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi | Meningkatkan kapasitas jasa konstruksi melalui 1)pelatihan penyelenggaraan terampil jasa konstruksi, 2) pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, 3)Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan 4) pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). | Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dengan prioritas pada pengawasan, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi |
| | Meningkatnya penanggulangan | meningkatkan kualitas | Peningkatan penanggulangan |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | <p>masalah banjir dan abrasi di kota pangkalpinang</p> | <p>penanganan banjir dan abrasi melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembangunan talud penahan tanah; 2) normalisasi saluran drainase; 3) pemeliharaan dan pengembangan fasilitas saluran drainase | <p>banjir, genangan dan abrasi dengan prioritas pada kawasan rawan genangan, banjir dan abrasi.</p> |
| <p>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan serta meningkatkan pengelolaan pertanahan</p> | <p>Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan tata ruang; 2) pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya dan 3) pengendalian tata ruang daerah | <p>meningkatkan sistem penyelenggaraan penataan ruang melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan penataan ruang; 2) pemanfaatan penataan ruang; 3) pengendalian penataan ruang | <p>peningkatan sistem penyelenggaraan penataan ruang dengan prioritas optimalisasi penataan ruang daerah</p> |
| | <p>Meningkatnya sistem pengelolaan dan pendataan tanah milik daerah</p> | <p>meningkatkan sistem pengeolaan dan pendataan tanah melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; 2) | <p>peningkatan sistem pengelolaan dan pendataan tanah dengan prioritas pada pengamanan aset pertanahan</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | penyelesaian konflik konflik pertanahan; 3) pendataan sistem pendaftaran tanah | |
|--|--|--|--|

BAB

6

**BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pangkalpinang

TERLAMPIR

BAB

7

**KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

| NO | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Target Akhir RPJMD |
|----|----------------------------|--------|--------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| | | | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | indeks kepuasan masyarakat | Indeks | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|--|--|--|--|--|--|
| | terhadap pelayanan infrastruktur daerah | | | | | | | | | |
| 2 | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | % | - | - | | | | | | |
| 3 | Persentase Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah | % | 0% | 0% | | | | | | |

BAB

8

PENUTUP

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2023

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Formula/Rumus Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Sumber | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|------|----|----|------|--|--|--|-------------|---------------------------------------|---|-----|----------------|-----|----------------|-----|--|----|--------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | X | XX | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu | Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu DIBAGI Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan awal 100 | % | - | | 100 | 10.446.905.400 | 100 | 10.370.075.400 | 100 | 20.816.980.800 | | | |
| | | X | XX | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | - | | 12 | 10.000.000 | - | - | 12 | 10.000.000 | | | |
| | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen RENJA (RKT, RKA dan DPA) yang disusun | | Dokumen | - | | 6 | 5.000.000 | 0 | - | 6 | 5.000.000 | | | |
| | | X | XX | 01 | 2.01 | 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan hasil capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun | | Dokumen | | | 6 | 5.000.000 | 0 | - | 6 | 5.000.000 | | | |
| | | X | XX | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | 1 | 5.212.970.400 | 1 | 5.342.943.200 | 2 | 10.555.913.600 | | | |
| | | X | XX | 01 | 2.02 | 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | orang/bulan | | | 100 | 5.202.970.400 | 57 | 5.342.943.200 | 157 | 10.545.913.600 | | | |
| | | X | XX | 01 | 2.02 | 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun | | Dokumen | | | 6 | 5.000.000 | 0 | - | 6 | 5.000.000 | | | |
| | | X | XX | 01 | 2.02 | 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD | Jumlah laporan keuangan semester yang disusun | | Dokumen | | | 6 | 5.000.000 | 0 | - | 6 | 5.000.000 | | | |
| | | X | XX | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Presentase terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah | | | | | 1 | 150.000.000 | - | - | - | 150.000.000 | | | |
| | | X | XX | 01 | 2.03 | 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD OPD | | Dokumen | | | 1 | 150.000.000 | 0 | - | - | 150.000.000 | | | |
| | | X | XX | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian | | | | | 160 | 200.000.000 | - | - | - | 200.000.000 | | | |
| | | X | XX | 01 | 2.05 | 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | | Stel | | | 160 | 200.000.000 | 0 | - | - | 200.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|------|---|---|--|---------|--|--|--|----|---------------|----|---------------|----|--------------------|--|--|
| | | X | XX | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah | | | | | | 7 | 723.935.000 | 7 | 1.027.037.000 | 14 | 1.750.972.000 | | |
| | | X | XX | 01 | 2.06 | 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | paket | | | | 4 | 5.300.000 | 4 | 5.300.000 | 8 | 10.600.000 | | |
| | | X | XX | 01 | 2.06 | 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | paket | | | | 7 | 300.000.000 | 7 | 155.570.000 | 14 | 455.570.000 | | |
| | | X | XX | 01 | 2.06 | 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | paket | | | | 12 | 75.000.000 | 12 | 126.097.000 | 24 | 201.097.000 | | |
| | | X | XX | 01 | 2.06 | 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | paket | | | | 5 | 25.000.000 | 5 | 37.450.000 | 10 | 62.450.000 | | |
| | | X | XX | 01 | 2.06 | 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | laporan | | | | 12 | 250.000.000 | 12 | 622.620.000 | 24 | 872.620.000 | | |
| | | X | XX | 01 | 2.06 | 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | dokumen | | | | 12 | 68.635.000 | 12 | 80.000.000 | 24 | 148.635.000 | | |
| | | X | XX | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Sarana dan prasarana aparatur yang tersedia DIBAGI dengan jumlah sarana dan prasana yang dibutuhkan | | | | | 2 | 3.000.000.000 | 1 | 3.000.000.000 | 3 | 6.000.000.000 | | |
| | | X | XX | 01 | 2.07 | 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | | Unit | | | | 1 | 1.000.000.000 | 0 | - | | 1.000.000.000 | | |
| | | X | XX | 01 | 2.07 | 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | Unit | | | | 0 | 2.000.000.000 | 1 | 3.000.000.000 | 1 | 5.000.000.000 | | |
| | | X | XX | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah | Jumlah layanan Jasa terpenuhi DIBAGI jumlah layanan Jasa yang dibutuhkan | | | | | 3 | 850.000.000 | 3 | 589.138.400 | 6 | 1.439.138.400 | | |
| | | X | XX | 01 | 2.08 | 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | Laporan | | | | 12 | 300.000.000 | 12 | 216.000.000 | 24 | 516.000.000 | | |
| | | X | XX | 01 | 2.08 | 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | Laporan | | | | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 24 | 100.000.000 | | |
| | | X | XX | 01 | 2.08 | 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | Laporan | | | | 12 | 500.000.000 | 12 | 323.138.400 | 24 | 823.138.400 | | |
| | | X | XX | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | laporan | | | | 2 | 300.000.000 | 2 | 410.956.800 | 4 | 710.956.800 | | |
| | | X | XX | 01 | 2.09 | 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan | | Unit | | | | 12 | 100.000.000 | 1 | 73.176.800 | 13 | 173.176.800 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----|------|----|--|---|--|---------------|------|--|--|-------|-------------|------|-------------|-----|----------------|--|--|
| | Meningkatnya Kapasitas Air Minum yang Terdistribusi | 1 | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan Jaringan perpipaan terdistribusi | | % | | | | 98 | 500.000.000 | 31,3 | 102.589.000 | 129 | 602.589.000 | | |
| | | | | | | | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber daya air minum layak | | % | 97,5 | | | 98 | | 98,5 | | | | | |
| | | | | | | | | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau | | liter / detik | 115 | | | 115,5 | | 116 | | | | | |
| | | | | | | | | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan | | % | 70 | | | 72,5 | | 75 | | | | | |
| | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | laporan | | | | 1 | 500.000.000 | 1 | 102.589.000 | 2 | 10.872.500.000 | | |
| | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 03 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun | | liter/detik | | | | 8 | 500.000.000 | 240 | 102.589.000 | 248 | 10.622.500.000 | | |
| | Meningkatnya sistem pengolahan air limbah domestik | 1 | 03 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | | persen | | | | 100 | 900.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | - | | |
| | | | | | | | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | | persen | 100 | | | 100 | | 100 | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | | persen | 100 | | | 100 | | 100 | | | | | |
| | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Laporan | | | | 1 | 900.000.000 | 1 | 500.000.000 | 2 | - | | |
| | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah | | | | | | | | 400.000.000 | | | | 400.000.000 | | |
| | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 15 | Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT | | | | | | | | 500.000.000 | | | | 500.000.000 | | |
| | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 16 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT | jumlah unit sarana dan prasarana yang di rehabilitasi/peningkatan/perluasan | | unit | | | | | | 7 | 500.000.000 | 7 | 500.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|------|---|--|---|-----------------|--|-----|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--|--|
| Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase dan Gorong-gorong | 1 | 03 | 06 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Tingkat kemandapan Sistem Drainase | Persen | | | 100 | 19.019.278.600 | 100 | 7.815.000.130 | 100 | 26.834.278.730 | | |
| | 1 | 03 | 06 | 2.01 | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | laporan | | | 3 | 19.019.278.600 | 3 | 7.815.000.130 | 6 | 26.834.278.730 | | |
| | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 05 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun | M | | 7 | 10.517.000.000 | 3.130 | 4.375.000.000 | 3.137 | 14.892.000.000 | | |
| | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 07 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi | M | | 7 | 7.045.384.209 | 725 | 2.840.000.130 | 732 | 9.885.384.339 | | |
| | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 08 | Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan | unit | | 5 | 1.456.894.391 | 11 | 600.000.000 | 16 | 2.056.894.391 | | |
| | 1 | 03 | 07 | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani | persen | | | 55 | 4.167.364.926 | 60 | 2.038.803.566 | 60 | 6.206.168.492 | | |
| | 1 | 03 | 07 | 2.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | laporan | | | | 4.167.364.926 | 1 | 2.038.803.566 | 1 | 6.206.168.492 | | |
| | 1 | 03 | 07 | 2.01 | 01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | sistem jaringan | | 1 | 4.167.364.926 | 32 | 2.038.803.566 | 33 | 6.206.168.492 | | |
| | 1 | 03 | 08 | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten / Kota | persen | | | 75 | 60.932.635.074 | 80 | 27.043.196.434 | 80 | 87.975.831.508 | | |
| | 1 | 03 | 08 | 2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | laporan | | | | 60.932.635.074 | 2 | 27.043.196.434 | 2 | 87.975.831.508 | | |
| | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta | dokumen | | 500 | 150.000.000 | 500 | 515.556.800 | 1.000 | 665.556.800 | | |
| | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | | 5 | 59.012.635.074 | 5 | 26.527.639.634 | 10 | 67.182.414.902 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|------|----|--|---|--|----------------|--|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|---|---|--|--|-------------|-----------------------|--|--|
| | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 04 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 100.000.000 | - | - | | | 100.000.000 | | | |
| | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 09 | Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan | Jumlah lokasi yang dilakukan penilaian | | lokasi | | | 50 | 50.000.000 | - | | | | | | | | 50.000.000 | | |
| | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 12 | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan yang di rehabilitasi | | Unit | | | 5 | 1.620.000.000 | - | | | | | | | | 6.145.000.000 | | |
| | | 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Tingkat Kematapan Jalan Kabupaten / Kota | | persen | | | 94,9 | 13.764.250.000 | 95,5 | 15.998.565.000 | 95,50 | | | | | | 29.762.815.000 | | |
| | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | laporan | | | 5 | 13.764.250.000 | 7 | 15.998.565.000 | 12 | | | | | | 29.762.815.000 | | |
| | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah dokumen survey yang disusun | | dokumen | | | | | 1 | 120.000.000 | 1 | | | | | | 120.000.000 | | |
| | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 05 | Pembangunan Jalan | Jumlah panjang jalan yang dibangun | | KM | | | 6,67 | 6.359.000.000 | 2,92 | 2.778.565.000 | 10 | | | | | | 9.137.565.000 | | |
| | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 08 | Rekonstruksi Jalan | Jumlah panjang jalan yang di rekonstruksi | | KM | | | 6,4 | 3.677.750.000 | 6,14 | 6.100.000.000 | 13 | | | | | | 9.777.750.000 | | |
| | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Jumlah panjang jalan yang di lakukan pemeliharaan | | KM | | | 2,75 | 627.500.000 | 1,38 | 1.300.000.000 | 4 | | | | | | 1.927.500.000 | | |
| | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Jumlah panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin | | KM | | | 2,5 | 3.000.000.000 | 2,92 | 2.000.000.000 | 5 | | | | | | 5.000.000.000 | | |
| | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 12 | Pembangunan Jembatan | Panjang Jembatan yang Dibangun | | M | | | 0 | - | 15 | 3.500.000.000 | 15 | | | | | | 3.500.000.000 | | |
| | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 23 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Jumlah dokumen pengawasan teknis yang disusun | | dokumen | | | 1 | 100.000.000 | 2 | 200.000.000 | 3 | | | | | | 300.000.000 | | |
| | | 1 | 03 | 11 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio tenaga operator / teknisi / anallsis yang memiliki sertifikat kompetensi | | persen | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | 200.000.000 | | |
| | | 1 | 03 | 11 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | 200.000.000 | | |
| | | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 03 | Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Mempunyai Sertifikat | | Orang | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | 200.000.000 | | |
| | Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW | 1 | 03 | 12 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan | | persen | | | 100 | 1.700.000.000 | 100 | 908.086.200 | 100 | | | | | | 2.608.086.200 | | |
| | | 1 | 03 | 12 | 2.01 | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | | dokumen | | | 1 | 680.229.982 | | | | | | | | | 680.229.982 | | |
| | | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 03 | Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota | | dokumen | | | 1 | 304.229.991 | 0 | | | | | | | | 304.229.991 | | |
| | | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 04 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang | | dokumen | | | 1 | 375.999.991 | 0 | | | | | | | | 375.999.991 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|---|---|----------------|--|--|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|--|--|
| 1 | 03 | 12 | 2.02 | Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | laporan | | | 1 | 490.337.553 | 1 | 443.215.800 | 2 | 933.553.353 | | |
| 1 | 03 | 12 | 2.02 | 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | dokumen | | | 1 | 369.467.562 | 1 | 443.215.800 | 2 | 812.683.362 | | |
| 1 | 03 | 12 | 2.02 | 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | dokumen | | | 1 | 120.869.991 | 0 | - | | 120.869.991 | | |
| 1 | 03 | 12 | 2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | laporan | | | 1 | 189.372.482 | 1 | 249.960.000 | 2 | 439.332.482 | | |
| 1 | 03 | 12 | 2.03 | 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | dokumen | | | 1 | 122.129.991 | 1 | 249.960.000 | 2 | 372.089.991 | | |
| 1 | 03 | 12 | 2.03 | 02 Sistem Informasi Penataan Ruang | Jumlah Aplikasi Yang Dihilangkan | aplikasi | | | 1 | 67.242.491 | 0 | - | | 67.242.491 | | |
| 1 | 03 | 12 | 2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | dokumen | | | 2 | 340.059.982 | 1 | 214.910.400 | 3 | 804.930.382 | | |
| 1 | 03 | 12 | 2.04 | 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Yang Dihilangkan | dokumen | | | 1 | 102.429.991 | 0 | 0 | | 352.389.991 | | |
| 1 | 03 | 12 | 2.04 | 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | dokumen | | | 1 | 237.629.991 | 1 | 214.910.400 | 2 | 452.540.391 | | |
| 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN | | | | | | 1.025.000.000 | | 18.842.668.516 | - | 19.867.668.516 | | |
| 2 | 10 | | | URUSAN PERTANAHAN | | | | | | 1.025.000.000 | | 18.842.668.516 | - | 19.867.668.516 | | |
| 2 | 10 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | Persentase izin lokasi yang sesuai dengan RTRW | persen | | | 100% | 75.000.000 | 100% | 75.000.000 | 100 | 150.000.000 | | |
| 2 | 10 | 02 | 2.01 | Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota | Jumlah laporan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota | laporan | | | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 2 | 150.000.000 | | |
| 2 | 10 | 02 | 2.01 | 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha | jumlah perizinan yang diawasi | dokumen | | | 8 | 75.000.000 | 8 | 75.000.000 | 16 | 150.000.000 | | |
| 2 | 10 | 04 | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase penyelesaian sengketa tanah | persen | | | 100% | 300.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100 | 650.000.000 | | |
| 2 | 10 | 04 | 2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. | Jumlah laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. | laporan | | | 2 | 300.000.000 | 2 | 350.000.000 | 4 | 650.000.000 | | |
| 2 | 10 | 04 | 2.01 | 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah | Dokumen | | | 3 | 150.000.000 | 3 | 175.000.000 | 6 | 325.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|--|--------------|--|--|------|-------------|------|----------------|-----|----------------|--|--|
| 2 | 10 | 04 | 2.01 | 02 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Berita Acara | | | 3 | 150.000.000 | 3 | 175.000.000 | 6 | 325.000.000 | | |
| 2 | 10 | 05 | | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | | persen | | | 100% | - | 100% | 17.300.000.000 | 100 | 17.300.000.000 | | |
| 2 | 10 | 05 | 2.01 | | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | terwujudnya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | | lahan | | | 0 | - | 3 | 10.324.823.696 | 3 | 10.324.823.696 | | |
| 2 | 10 | 05 | 2.01 | 01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Dokumen | | | - | - | 3 | 10.324.823.696 | 3 | 10.324.823.696 | | |
| 2 | 10 | 06 | | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee | terlaksananya redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan | persen | | | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100 | 750.000.000 | | |
| 2 | 10 | 06 | 2.01 | | Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | laporan | | | 4 | 350.000.000 | 4 | 400.000.000 | 8 | 750.000.000 | | |
| 2 | 10 | 06 | 2.01 | 01 | Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah | Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | Dokumen | | | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 4 | 200.000.000 | | |
| 2 | 10 | 06 | 2.01 | 02 | Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah | Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | Dokumen | | | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 4 | 200.000.000 | | |
| 2 | 10 | 06 | 2.01 | 03 | Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah | | Dokumen | | | 2 | 75.000.000 | 2 | 100.000.000 | 4 | 175.000.000 | | |

